

Implementasi Program Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bagi Lansia Terlantar

Oleh:

Sri Wahyuni,

Nama Dosen Pembimbing : Isna Fitria Agustina, M.Si

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2026



Pendahuluan

Lansia adalah periode dimana organisme telah mencapai masa keemasan atau kejayaannya dalam ukuran, fungsi, dan juga beberapa telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan berjalannya waktu. Perubahan fungsi organ-organ tubuh, peran sosial lansia di lingkungan masyarakat, pekerjaan merupakan suatu hal yang tidak terelakkan, semua itu merupakan proses alamiah dari manusia yaitu lahir, tua dan meninggal. Masa lansia merupakan masa dimana lansia mengalami suatu kehilangan yang bersifat pasti, yaitu berkurangnya fungsi pendengaran, penglihatan, kekuatan fisik dan kesehatan. Seiring berjalannya usia para lansia yang usianya sudah tidak produktif kerap kali identik dengan kemiskinan akibat dari sudah berhenti masa kerjanya dan tidak mendapatkan upah lagi, dengan menganggap dirinya sudah tidak produktif lagi dampak paling buruk yang terjadi adalah para lansia tersebut menjadi orang yang tidak bermanfaat seperti menjadi pengemis dan gelandangan



Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial yang mencakup penjangkauan, asesmen, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, pembinaan kedisiplinan, pelatihan keterampilan, hingga pemulangan atau reunifikasi keluarga. Penyelenggaraan layanan sosial tersebut sesuai dengan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memberikan pemberdayaan para lansia tersebut dengan mendirikan Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) satu-satunya yang berada di Sidoarjo dan baru berdiri pada tahun 2011. Tugas pemberdayaan ini menjadi wewenang dari Liponsos Sidoarjo. Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo merupakan tempat tinggal bagi individu dari berbagai kelompok usia yang menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi.

Data Empiris

Tabel 1. Data lansia yang ada di Liponsos Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2025

Tahun	2023	2024	2025
Laki-Laki	17	15	24
Perempuan	14	18	8
Jumlah	31	33	32

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah lansia dalam tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa lansia yang sudah berapa di Liponsos meninggal dunia atau telah diantarkan kembali ke keluarga. Liponsos Kabupaten Sidoarjo merupakan tempat menampung mereka para orang lansia dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Mulai dari lansia terlantar karena keluarga, gelandangan, tidak punya rumah sampai eks pengurus pondok itu sendiri.

Gab Masalah

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Layanan Terhadap Lansia Terlantar.
- Kapasitas Liponsos Kabupaten Sidoarjo Yang Terbatas Dikarenakan Tidak Hanya Lansia Terlantar Saja Yang Ada Di Dalamnya.
- Kandala Identifikasi Identitas Lansia Dikarenakan Lansia Tersebut Tidak Memiliki Kartu Identitas (Ktp) Ataupun Mengalami Dimensia

Metode

Jenis Penelitian :

Kualitatif

Lokasi Penelitian :

Dinas Sosial Kab.
Sidoarjo

Sumber Data :

- Data Primer
- Data Sekunder

Fokus Penelitian :

Implementasi menurut
Edward III

Teknik Pengumpulan Data :

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi

Teknik Penentuan Informan :

Purposive Sampling

Informan :

1. Kabid Rehabilitasi Dinsos
Kab. Sidoarjo
2. Kepala Liponsos Kab.
Sidoarjo
3. Lansia

Teknik Analisis Data :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Analisis dan Pembahasan

Analisis implementasi program menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut :

1. Komunikasi

Indikator komunikasi dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan melalui komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal diwujudkan melalui koordinasi antara Dinas Sosial, pekerja sosial, TKSK, dan Liponsos dengan pembagian tugas yang jelas sesuai fungsi masing-masing dalam proses asesmen, penjangkauan, evakuasi, hingga rehabilitasi sosial. Selain itu, komunikasi eksternal dilakukan oleh TKSK melalui koordinasi dengan masyarakat, RT/RW, serta pemerintah desa atau kelurahan dalam menerima laporan, melakukan verifikasi, dan menindaklanjuti penanganan lansia terlantar. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa kesulitan memperoleh informasi identitas lansia terlantar karena tidak memiliki identitas diri dan mengalami demensia sehingga proses penelusuran identitas memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia terdiri atas pekerja sosial, TKSK, dan petugas Liponsos yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing dalam penanganan lansia terlantar. Namun, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya operator layanan operasional di Liponsos, sehingga petugas harus menangani beberapa tugas secara bersamaan. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, Dinas Sosial telah menyediakan fasilitas pendukung berupa kendaraan operasional, ruang pelayanan, tempat tinggal lansia, fasilitas kesehatan, serta perlengkapan pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung pelaksanaan penjangkauan, asesmen, evakuasi, dan rehabilitasi sosial.

Analisis dan Pembahasan

3. Disposisi

Indikator disposisi pada implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan program. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing, mulai dari menerima laporan, melakukan asesmen, penjangkauan, koordinasi, hingga memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada lansia terlantar. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pembinaan kepada petugas untuk menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan.

4. Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi dalam implementasi Program Perlindungan Lansia Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas antarunit pelaksana. SOP penerimaan lansia terlantar menjadi pedoman bagi seluruh petugas dalam melaksanakan tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, koordinasi, hingga rehabilitasi sosial di Liponsos. Selain itu, pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, TKSK, pemerintah desa atau kelurahan, puskesmas, dan Liponsos, sehingga proses penanganan berlangsung secara terkoordinasi tanpa tumpang tindih kewenangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian **Implementasi Program Perlindungan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Bagi Lansia Terlantar**, **pertama, komunikasi** telah berjalan melalui koordinasi internal dan eksternal dalam proses pelaporan serta penanganan lansia terlantar, namun masih terkendala sulitnya memperoleh identitas lansia yang tidak memiliki dokumen diri atau mengalami demensia. **Kedua, sumber daya** didukung oleh pekerja sosial, TKSK, petugas Liponsos, serta sarana dan prasarana yang memadai, tetapi jumlah operator layanan operasional di Liponsos masih terbatas. **Ketiga, disposisi** terlihat dari komitmen petugas dalam menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawab serta adanya pembinaan dari Dinas Sosial. **Keempat, struktur birokrasi** telah didukung SOP dan pembagian tugas yang jelas antar pihak terkait sehingga proses penanganan lansia terlantar dapat berjalan secara terarah.

Referensi

1. Suardiman, Siti Partini. 2011. Psikologi Lanjut Usia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
2. Papalia, Diane E, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Feldman and Dana Gross. 2001. Human Development (Eight edition). Boston: Mc Graw Hill.
3. Widiyari, Yuki, 2010. Dinamika Psikologis Pencapaian Sukses Aging pada Lansia yang Mengikuti Program Yandu Lansia. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
4. Undang-undang No 13 Tahun 1998 Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Kesejahteraan lanjut usia.
5. Bellia Ananda, Azizah Husin, dan Imron A. Hakim. 2018. “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Lansia di Panti Warga Tama Kabupaten Ogan Ilir”. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 5. No. 1. Palembang: Universitas Sriwijaya.
6. Susanti, R. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tasikmalaya. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 1(3), 235–242
7. Edi Suharto, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
8. Suardiman, S. P. 2011. Psikologi Lanjut Usia. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
9. Edward III, George C, 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
10. Mariama Qamariah, Afifuddin, Suyeno. 2023. Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). Jurnal Respon Publik Vol. 14 No. 4 Hal. 1-7.
11. Deyana Firdhausya Nurazmimar. 2023. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Dharma Bekasi. Privat Lav Vo. 11 No.1.
12. Gusti Nadiyah, Agus Surya Dharma, Mph. Fajar Noorahman. 2025. Implementasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Jurnal Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1.
13. Rika Rikhmalia Putri dan Isna Fitria Agustina. 2025. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kedungrawan Krembung. Archive.umsida.ac.id.
14. Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9 (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
15. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
16. Widodo, Joko, 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
17. M. Achmad, Hamsah, and Nurkadarwati, “Implementasi Kebijakan Sistem E-Surat Dalam Mewujudkan E- Government Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah,” J. Ilm. Adm. Pemerintah. Drh., vol. 13, no. 1, pp. 108–117, 2021.
18. Sulila, I. (2015). Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

